

TUGAS AKHIR

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA RENGAT

*Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi Diploma Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Di susun oleh :

RINI RETNOWATI
01076203667



**PROGRAM STUDI DIPLOMA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat

Oleh : Rini Retnowati

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dari tanggal 01 Januari s/d 30 April 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Berdasarkan tujuan penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan , faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, sikap wajib pajak. niat berperilaku wajib pajak, iklim keorganisasian Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk menjadi rahmat sekalian alam. Tugas akhir ini membahas tentang “ **Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat**”. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang memberikan dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang yang tak terbalaskan dan selalu memberikan yang terbaik untuk saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. M Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif kasim Riau
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M, Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
4. Bapak Mahmuzar, M. Hum. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan.
5. Ibu Mustiqowati, M. Si Selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Perpajakan.
6. Bapak Yusrialis, SE. M. Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukan bagi penulis.
7. Dosen- dosen beserta staf-staf yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

8. Bapak Kepala Kantor beserta Staf- staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat yang telah menerima, mengizinkan dan membantu penulis dalam proses pengambilan data.
9. Teman teman kost khususnya adek rita yang selalu jadi korban kekesalan, adek ela, adek rifa, kak liza yang selalu berbaik hati ngizinkan print gratis. Semoga cepat nyusul sidang munaqhosoh.
10. Sahabatku fadila sagita yang selalu di repotin, yesika, dewi, vika dan andi amarullah yang selalu memotivasi penulis.
11. Teman teman seperjuangan ADP, nurzi, fara, fiza, darlina uli, beserta teman yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu semoga sukses selalu untuk semua
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir.

Peribahasa mengatakan bahwa “Tiada Gading Yang Tak Retak” Demikian pula dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala masukan, kritik , dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga dengan selesainya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, Mei 2013

Rini Retnowati
01076203667

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR DIAGRAM.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Peneltian.....	5
1.3.1. Tujuan penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Peneltian.....	6
1.4 . Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tempat Penelitian.....	6
1.4.2. Waktu Penelitian.....	6

1.4.3. Jenis data.....	6
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.5. Analisis Data.....	7
1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	8

BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA RENGAT

II.1. Sejarah KPP Pratama Rengat.....	10
II.2. Visi dan Misi	12
II.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Rengat.....	13
II.4. Uraian Tugas KPP Pratama Rengat.....	13

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI.....16

III.1. Pengertian pajak secara umum.....	16
III.2. Fungsi Pajak.....	17
III.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	18
III. 4. Asas Pemungutan Pajak.....	19
III.5. Syarat pemungutan Pajak.....	19

III.6. Pengertian Wajib Pajak	20
III.7. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
III.8. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	21
III.9. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
III.10. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	24
III.11. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	25
III.12. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	26
III. 13. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	27
III.14. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	30
III.15. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	33
III.16. Syarat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.....	35
III.17. Pengertian Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	36
III. 18 . Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	36
III.19. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	36
III. 20. Penyetoran dan Pelaporan Surat pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	38
III. 21. Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan.....	40

III.22. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
B.Tinjauan Praktek.....	47
III.1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu, terlambat lapor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat	47
III.2. Faktor- faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.	48
III.3. Perhitungan PPN Menurut Kantor Pelayanan pajak dengan ketentuan Umum Perpajakan (KUP)	52
III.4.. Kebijakan KPP Pratama Rengat dalam meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam pelaporan surat Pemberitahuan (SPT).....	53
III.5. Kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.....	54
 BAB IV . PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Mempunyai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan luhur tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat di tempuh adalah mencari sumber penerimaan dalam negeri. Di sisi lain penerimaan dalam negeri dari sektor migas yang peranannya sangat besar telah semakin berkurang sehingga penerimaan dalam negeri bertumpu pada sektor pajak.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan memegang peranan penting di negara Indonesia, melalui penerimaan negara atas pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, pemerintah akan mampu membiayai segala keperluan rutin penyelenggaraan pemerintah dan juga untuk menyediakan berbagai sarana maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan. Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2007).

Jenis pajak berdasarkan pemungut ada dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan sumber penerimaan negara

Contoh : PPh/pajak penghasilan , PPN/pajak pertambahan nilai, Bea Materai/ pajak penjualan atas barang mewah, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah . Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) PBB/(pajak bumi dan bangunan).

Salah satu jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini terlihat pada penerapan sistem perhitungan sendiri (*System Self Assesment*). di mana wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak berperan aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak(DJP) hanya berperan sebagai pembina , pengawas, peneliti, serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting

penerapan(*self assessment system*) dalam peningkatan penerimaan pajak. Maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan, untuk melaporkan penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar SPT di bedakan menjadi dua yaitu: SPT suatu masa pajak dan SPT Tahunan. Salah satu SPT Masa adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun yang terjadi di lapangan penerepan *system Self Assesment* di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat belum berjalan secara maksimal karena tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat masih sangat rendah, kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat cenderung menurun dari tahun ke tahun. Menurut data statistik, wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat selalu meningkat. Namun pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru

menurun . Di bawah ini disajikan table tingkat kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Tabel I.I.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

No	Tahun	Jumlah wajib pajak / PKP (pengusaha kena pajak) terdaftar	Jumlah SPT Masa PPN yang di sampaikan	Presentase kepatuhan (%)
1.	2009	2.158	9.436	4,37 %
2.	2010	2.225	8.563	3,84 %
3.	2011	2.338	6.588	2,81 %

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).KPP Pratama Rengat

Dari tabel 1.1 di atas dapat di lihat yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami perubahan berupa Penurunan kepatuhan wajib pajak Setiap tahunnya. Pada tahun 2009 presentase kepatuhan wajib pajak 4,37% selanjutnya menurun 0,53% pada tahun 2010 kepatuhan wajib pajak atau pengusaha Kena Pajak menjadi 3,84%. Dan pada tahun 2011 kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak.sebesar 0,64% menjadi2,81%.

Salah satu penyebab menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah masyarakat masih kurang menyadari arti pentingnya pajak

kurangnya pengetahuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sikap wajib pajak, niat berperilaku wajib pajak, iklim keorganisasian wajib pajak, kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat**”.

1.2 . Perumusan Masalah.

Perubahan system yang di gunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari System Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) menjadi System Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyebabkan data-data wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tarik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pusat, sehingga untuk menarik data-data wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut memerlukan waktu yang cukup lama , oleh karena itu, keterbatasan data yang di peroleh penulis maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN di kantor pelayanan pajak pratama Rengat .

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi KPP Pratama Rengat
2. Sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

1.4. Metode Penelitian.

1.4.1.Tempat Penelitian

Penelitian di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat yang beralamat di JL. Bupati tulus No 09.

1.4.2. Waktu Penelitian.

Penelitian di lakukan sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Maret 2013.

1.4.3.Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan 2 teknik yaitu teknik observasi dan interview.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan nya. Dari teknik observasi ini penulis mendapatkan data jumlah Pengusaha Kena pajak, jumlah pengusaha yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tahun 2009 s/d 2011. Sejarah KPP Pratama Rengat, Struktur bagan organisasi dll.

b. Interview.

Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap yang mampu memberi informasi kepada penyusunan penelitian ini. Adapun dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah kepala seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

1.4.5. Analisis Data.

Setelah data data yang sudah di kumpulkan secara sistematis maka penulis melakukan analisis yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak di nyatakan dengan angka-angka.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan di sajikan secara menyeluruh:

BAB I:PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian ,manfaat penelitian , metode penelitian , teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA RENGAT

Pada bab ini akan di uraikan tentang sejarah singkat kantor KPP Pratama Rengat, Wilayah kerja kantor Pelayanan pajak Pratama Rengat.Visi ,Misi kantor Pelayanan pajak Pratama Rengat.,Tujuan kantor , Struktur organisasi kantor Pelayanan pajak Pratama Rengat, Uraian Tugas Kantor Pelayanan pajak Pratama Rengat.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini merupakan Telaah Pustaka , Pada Bab ini akan di uraikan tentang Pajak secara umum, wajib pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, Asas Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar hukum PPN, Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Syarat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ,Pengertian Surat Pemberitahuan, Fungsi surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jenis surat pemberitahuan masa PPN, penyeteran

dan pelaporan SPT masa PPN. Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak . Pajak dalam perspektif islam.daftar tabel dan diagram jumlah wajib pajak yang lapor SPT Masa PPN, faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kepatuhan wajib pajak , perbandingan perhitungan PPN menurut KUP dengan KPP, Kebijakan yang di lakukan kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN, kendala-kendala yang di hadapi kantor pelayanan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA RENGAT.

II.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Secara bertahap sejak tahun 2002 KPP mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi bukan lagi pada jenis pajak, KPP modern juga merupakan penggabungan dari KPP Konvensional dan kantor pemeriksa dan penyidikan pajak, begitu juga Kantor pelayanan pajak Rengat menjadi KPP Pratama Rengat Pada 27 mei 2008. Yang mana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat memiliki wilayah Kerja sebagai berikut:

A . Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hulu:

1. Batang Cenaku
2. Batang Gangsal
3. Batang Peranap
4. Kelayang
5. Kuala Cenaku
6. Lirik
7. Lubuk Batu Jaya
8. Rakit Kulim
9. Rengat
10. Rengat Barat
11. Seberida
12. Sungai Lala
13. Pasir Penyu

14. Peranap

B. Kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir:

1. Batang Tuaka.
2. Belengkong.
3. Enok.
4. Gaung.
5. Gaung Anak Serka.
6. Kateman.
7. Kuala Indragiri
8. Kemuning.
9. Kempas.
10. Keritang.
11. Loncong.
12. Mandah
13. Pelangiran
14. Pulau Burung Gaung.
15. Reteh.
16. Sungai Batang.
17. Tanah Merah
18. Tembilahan.
19. Tembilahan Hulu
20. Tempuling

C . Kecamatan kabupaten Kuantan singingi:

1. Benai.

2. Cerenti.
3. Gunung Toar.
4. Hulu Kuantan
5. Inuman.
6. Kuantan Hilir
7. Kuantan Mudik.
8. Kuantan Tengah.
9. Logas tanah darat
10. Pangean.
11. Singingi.
12. Singingi Hilir.

II.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

II.2.1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

“Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

II.2.2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

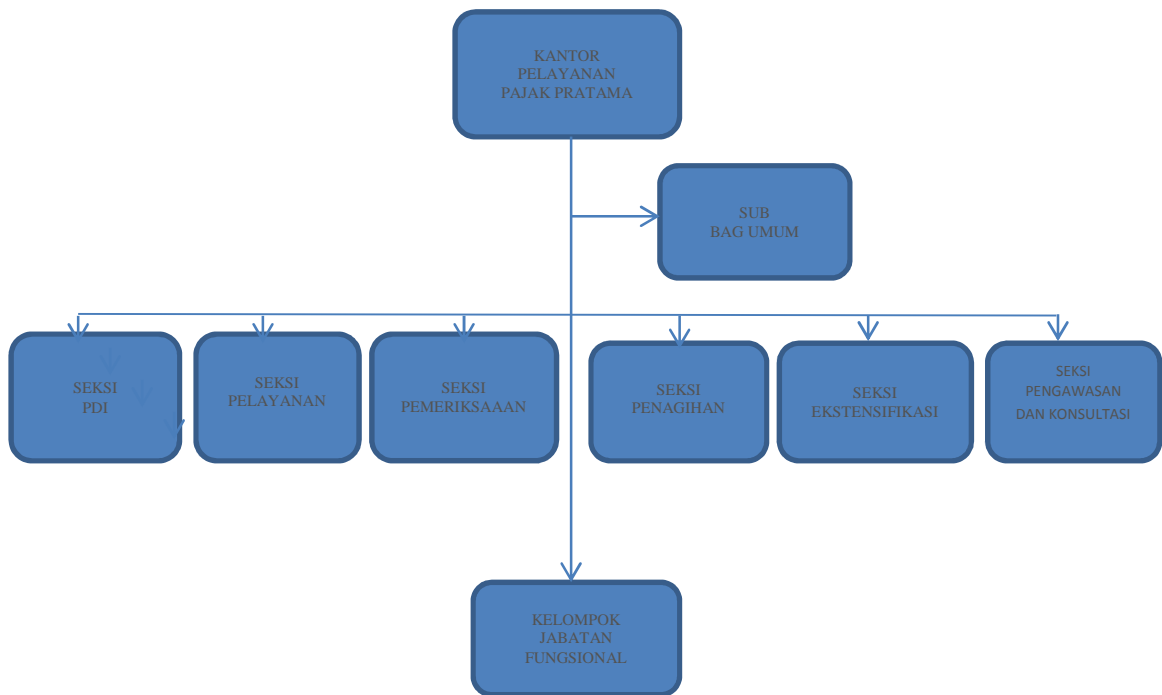
II.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Rengat.

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan tugas-tugas fungsi- fungsi, wewenang serta

tanggung jawab masing- masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur.

Adapun Struktur Organisasi KPP Rengat adalah :

Gambar II.1.
Bagan Struktur KPP Pratama Rengat



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

II.4. Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Kepala kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerja sama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

1. Sub bagian umum

Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.

- a. Melakukan urusan keuangan.
- b. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

2. Seksi Pelayanan.

- a. Penetapan dan produk hukum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen berkas perpajakan.
- c. Penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Penyajian informasi perpajakan
- d. Perekaman dokumen perpajakan
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan
- g. Pelayanan dukungan teknis komputer
- h. Pemantauan aplikasi *e_SPT* dan *e-filling*
- i. Penyiapan laporan kinerja

4. Seksi Ekstensifikasi

- a. Pelaksanaan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pendataan objek pajak.
- c. Penilaian objek pajak.
- d. Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan penata usahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pemeriksaan.

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak.
- d. Administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

7. Seksi pengawasan dan konsultasi.

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH,PPN,PBB,PBHTB dan pajak lainnya.
- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam melakukan intensifikasi.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI.

III.1. Pengertian Pajak Secara Umum.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dan dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Adriani dalam Herry Purwono (2010 :7) “ pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemahamidjaja dalam Djoko muljono (2010 :1) Pajak adalah iuran wajib uang atau barang yang di pungut oleh penguasa

berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi di atas dapat kita pahami sebenarnya penilaian para ahli mengenai pajak adalah sama yaitu di tujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan secara umum. Dari definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok :

1. Pajak di pungut berdasarkan undang- undang yang berlaku.
2. Dalam pembayaran pajak kontraprestasinya tidak dapat di rasakan langsung.
3. Pajak di peruntukkan untuk kemakmuran rakyat.

III.2. Fungsi Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:2). Pajak mempunyai dua fungsi pokok yaitu fungsi budgetair(sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend(mengatur)

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulierend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang tinggi di kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras

2. Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi barang-barang mewah .
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

III.3. Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem pemungutan pajak ada tiga yaitu :

1. Official Assesment System.

Adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak adapun ciri-ciri Official Assesment System adalah:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada fiskus.

- a. Wajib pajak bersifat pasif.
- b. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang adapun ciri ciri Self Assesment System yaitu :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

III. 4. Asas Pemungutan Pajak.

- a. Asas domisili yaitu : bahwa pajak yang di bebaskan pada pihak yang tinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- b. Asas sumber yaitu : bahwa pembebanan pajak oleh negaranya hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan yaitu : bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembenanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.

III.5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai Berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di sesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus Berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

III.6. Pengertian Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2011: 23) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

1. Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

2. Wajib pajak badan

Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koprasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, pengertian bentuk badan lainnya adalah bentuk kerjasama operasi.

III.7. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Mardiasmo (2011:31) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, untuk melaporkan penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

III.8. Fungsi Surat Pemberitahuan(SPT) .

Menurut Mardiasmo (2011:31) Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan

mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak harta atau kewajiban.
- b. Pembayaran dari pemotong atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN&PPnBM.

III.9. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).

Jenis SPT ada dua yaitu:

- 1) SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- 2) SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak

SPT Masa ada beberapa jenis:

1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
2. SPT Masa PPh Pasal 22
3. SPT Masa PPh Pasal 23
4. SPT Masa PPh Pasal 25
5. SPT Masa PPh Pasal 4(2)
6. SPT Masa PPN
7. SPT Masa PPN Pemungut
8. SPT Masa PPnBM

Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan ada beberapa jenis:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. SPT untuk Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai (1770 S)
- b. SPT untuk Wajib pajak OP yang berstatus sebagai usahawan (1770)
- c. SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pegawai dengan jumlah penghasilan bruto setahun kurang dari Rp. 60.000.000,- (1770 SS)

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771)

2. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721)

Menurut Mardiasmo (2011:34) Secara garis besar Surat Pemberitahuan(SPT) di bedakan menjadi dua yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

Surat Pemberitahuan(SPT) Masa terdiri dari :

1. SPT Masa Pajak Penghasilan.
 2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai : dan
 3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau Bagian tahun pajak.

III. 10. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur lain oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merek dagang, paten, dll).

Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang

dikenakan PPN, Contohnya: jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara, dll.

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (biasa disingkat PKP). Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.

III. 11. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN adalah undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009, undang- undang ini lebih di kenal dengan sebutan UU PPN 1994 karena mulai berlaku dengan 1 juli 1984(pasal 20 UU PPN 1984).

Dalam Perjalanannya Undang- undang No 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali mengalami perubahan yaitu :

1. Mulai 1 januari 1995 di ubah dengan undang- undang No 11 tahun 1994 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan.
2. Mulai 1 januari 2001 di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang No 8 tahun 2000 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16 C namun tidak berurutan.

3. Mulai 1 April 2010 di ubah untuk ke tiga kalinya dengan Undang-Undang No 42 tahun 2009 meliputi pasal 1 sampai dengan pasal 16 F.

III. 12. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Untung Sukardji (2009:19) Pajak Pertambahan Nilai (value Added Tax) merupakan pengganti dari pajak penjualan yang sudah berlaku di indonesia sejak tahun 1951 (UU pajak penjualan 1951). Pergantian sistem perpajakan ini di kenal dengan tax reform 1983 karena PPN mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak tidak langsung

PPN sebagai pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban (destinataris) pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa PPN.

2. Pajak objektif.

PPN sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat di tentukan oleh adanya objek pajak dn tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. PPn sebagai pajak objektif akan menimbulkan dampak regresif bahwa semakin tinggi kemampuan konsumen , semakin ringan beban yang di pikul, sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang di pikul.

3. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi hanya di kenakan atas barang dan jasa yang di konsumsi di dalam daerah Pabean Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yang di gunakan dalam pengenaan PPN bahwa PPN di kenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan di konsumsi atau di manfaatkan.

4. Bersifat (*multy stage levy*)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi barang atau jasa bersifat Non komulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.

5. Penghitungan PPN dengan (*inderect subtraction method*).

Metode penghitungan PPN dengan cara mengurangkan PPN yang di pungut oleh penjual pengusaha atas jasa penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang di bayar kepada pengusaha lain atas perolehan barang atau jasa.

6. Tarif Tunggal (*single rate*)

Penerapan tarif PPN adalah untuk menyederhanakan dan mempermudah dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan, tarif tunggal PPN dalam UU PPN 1984 di tetapkan sebesar 10%. Tarif pajak ini dapat di rubah dengan peraturan Pemerintah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan.

III. 13. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Siti Resmi (2012: 25) dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor , nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh pengusaha karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang di pungut berdasarkan undang-undang dan potongan yang di cantumkan dalam faktur, Harga jual merupakan DPP untuk menyerahkan BKP. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian harga baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya di tambah dengan biaya- biaya seperti penyusutan, serta laba yang di harapkan.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya-biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang di dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalamanyang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti ‘jasa” tersebut.

3. Nilai Impor.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk di tambah pungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang undanganPabean

untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut berdasarkan undang undang PPN. Rumus menghitung nilai impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea masuk} + \text{pungutan lainnya yang Sah}$$

C = *Cos* (harga faktur).

I = *Insurance* (bea masuk antar Daerah Pabean).

F = *freight* (ongkos angkut atau pengapalan antar daerah pabean).

4. Nilai Ekspor.

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh eksportir, nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat di jadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Berapapun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen PEB. Tidak ada penghitungan PPN karena untuk barang ekspor adalah 0%. Dengan tarif 0% maka PKP dapat mengajukan restitusi PPn dalam rangka ekspor BKP.

5. Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Nilai lain adalah jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Nilai lain tersebut di tetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemakain sendiri BKP/JKP adalah harga jual atau penggantian setelah d kurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma cuma BKP/JKP adalah harga jual atau penggantian setelah d kurangi laba kotor.

- c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul
- d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.

III.14. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (www.pajakonline.com). Menurut Djoko Muljono (2010:5) Objek pajak dapat berupa Barang Kena Pajak (BKP) maupun jasa Kena Pajak (JKP) Dalam pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D UU PPN 1984 di atur bahwa Pajak pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang kena pajak di dalam daerah pabean yang di lakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang di lakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam Daerah pabean.
6. Ekspor Barang kena pajak oleh pengusaha.
7. Ekspor Barang tidak Berwujud oleh pengusaha Kena Pajak Atau
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
9. Kegiatan membangun sendiri yang di lakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang

hasilnya di gunakan sendiri atau di gunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya di tetapkan dengan peraturan Menteri keuangan Nomor 39/ PMK.03/ 2010 tanggal 22 februari 2010.

10. Pajak pertambahan nilai di kenakan atas penyerahan Brang kena pajak berupa Aktiva(mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau barang kena pajak lainnya,)

Yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan oleh pengusaha kena pajak. Kecuali atas:

- a. Penyerahan aktiva atau pengalihan barang kena pajak yang pajak masukannya tidak dapat di kreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. (pasal 9 ayat 8 huruf b UU PPn 1984).
- b. Penyerahan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon yang pajak masukannya perolehan aktiva tersebut tidak di kreditkan (pasal 9 ayat (8) huruf C UU PPN 1984).

Menurut Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 14 A . Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
 - a. beras

- b. gabah
 - c. jagung
 - d. sagu
 - e. kedelai
 - f. garam baik yang beryodium maupun tidak. Beryodium.
 - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa di olah, tetapi telah melalui proses di sembelih, di kuliti, di potong, di kemas atau tidak di kemas, di garami, di kapur, di asamkan, di awetkan dengan cara lain dan /di rebus.
 - h. Telur yaitu, telur yang tidak di olah termasuk telur yang tidak di bersihkan di asinkan atau dikemas.
 - i. Susu , yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun di panaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan dikemas atau tidak di kemas.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; . uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;
- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. jasa penyediaan tempat parkir;
- o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. jasa boga atau catering.

III.15. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban perpajakan (www.pajakonline.com) . Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pengusaha Kena pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak dan atau penyerahan Jasa Kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang

batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (www.ilmu-ekonomi.com) . Adapun subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tentukan bahwa yang melakukan penyerahan adalah pengusaha. Pengertian “pengusaha” yang di maksud dalam pasal 1 angka 14 undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 adalah :

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Pengusaha ini meliputi pengusaha yang sudah di kukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak (PKP) atau seharusnya sudah di kukuhkan sebagai PKP namun belum di kukuhkan PKP, sehingga dapat di pahami bahwa dalam hal yang pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) maka pada dasarnya pengusaha Ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Subjek Pajak Pertambahan Nilai di bagi menjadi dua yaitu :

1. Pengusaha kena pajak (PKP)

Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

2. Bukan pengusaha kena Pajak (Non PKP)

Pengusaha yang bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi:

a. Pengusaha yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP)

Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) , tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak(JKP), dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean, dan kegiatan membangun sendiri yang di lakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

b. Pengusaha kecil

Kriteria pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP (jumlah keseluruhan) di jumlah dengan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000 yang di lakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

III.16. Syarat Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penyerahan barang atau jasa yang di kenakan PPN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang atau jasa yang di serahkan merupakan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak.
2. Penyerahan di lakukan di dalam daerah pabean dan
3. Penyerahan di lakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha kena pajak yang bersangkutan.

Ketiga persyaratan di atas bersifat Kumulatif dan saling berkait antara satu dengan yang lainnya.

III.17. Pengertian Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah surat oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan, untuk melaporkan penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

III. 18 . Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak PPN.

1. **Bagi pengusaha kena pajak (PKP)**, fungsi SPT Masa PPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. **Bagi pemungut PPN**, fungsi SPT Masa PPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan PPN yang telah dipungut dan disetorkannya dengan menggunakan formulir SPT masa PPN untuk pemungut PPN.

III.20. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Siti Resmi (2012:131) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang di gunakan oleh Pengusaha kena Pajak yang menggunakan penghitungan normal yang menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran (normal).

- a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111 terdiri atas dua Bentuk

- a. Formulir Kertas (*hard copy*)
- b. Data elektronik (*e- SPT*)

2. Surat Pemberitahuan(SPT) Masa PPN 1111 DM.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang wajib diisi oleh setiap PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan

berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanyadalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu,kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakanpedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.Ayat (7a) BesarnyaPajak Masukan yang dapat dikreditkan olehPengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usahatertentu dihitung dengan menggunakan pedomanpenghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1111DM terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Formulir Kertas (*Hard Copy*)
- b. Data elektronik (*e- SPT*).

3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT di gunakan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1107 PUT terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Formulir Kertas (*Hard Copy*)
- b. Data elektronik (*e- SPT*).

III. 20. Penyetoran dan Pelaporan Surat pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penentuan batas waktu penyeteroran dan pelaporan pajak di atur dalam undang-Undang Republik Indonesia No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) Pasal 15A .

1. Batas waktu Penyeteroran.

Penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus di setor paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya Masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai di sampaikan.

Menurut Waluyo (2011:19) penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan PPnBM dalam suatu masa pajak yang terutang harus di lakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu, atau hari libur nasional pembayaran atau penyeteroran dapat di lakukan pada hari kerja berikutnya. Kecuali pada tanggal 31 maret harus di setorkan pada hari itu juga.PPN yang pemungutannya di lakukan oleh Bendahara atau instansi yang di tunjuk harus di setor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN .

Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai(PPN) disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa

Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai di sampaikan paling lama akhir bulan berikutnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak . Dalam batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau Libur nasional, penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama nasional, maka SPT masa PPN di sampaikan pada hari kerja berikutnya.

Menurut Waluyo (2011:22) Surat Pemberitahuan(SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan laporan bulanan yang harus di sampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM harus di sampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

Menurut Djoko Muljono (2010:4) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai Kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, paling lambat tanggal 20 setelah bulan di pungutnya PPN, yang merupakan sarana pertanggungjawabban PKP atas kegiatannya memungut PPN pada saat Penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP).

III. 21. Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan.

Sanksi wajib pajak apabila tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak tepat waktu ada dua yaitu :

a. Sanksi Administrasi

Dalam undang-undang perpajakan Pasal 7 UU No.28 tahun 2007 denda tidak menyampaikan SPT tepat waktu :

Urain	Jumlah
a) SPT Masa PPN	Rp. 500.000
b) SPT Masa Lainnya.	Rp. 100.000
c) SPT Tahunan PPh Badan.	Rp. 1.000.000
d) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP).	Rp. 100.000

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 7 ayat 2 Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:

- a) Bentuk usaha Tetap yang tidak melakukan Kegiatan lagi di indonesia.
- b) Bendahara yang tidak melakukan Pembayaran Lagi.

Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Sanksi Pidana Perpajakan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan yang di atur dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 38 dan pasal 39 ayat (1) huruf C.

- a. Setiap orang keaalpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/ lengkap atau

melampirkan keterangan tidak benar di denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

- b. Pasal 39 ayat 1 Huruf c menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak lengkap,terkena sanksi pidana paling singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

III.22. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut widi widodo (2010:75) Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah pungutan yang di tarik dari rakyatoleh penarik pajak. Dharibah yang artinya bebab disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Menurut Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. Baik ulama mutaqaaddimin (ulama klasik), maupun ulama muta'akhirin (kontemporer).

a. Ulama klasik (Muqoddimin)

Madzhab Syafi'i: Imam Ghazali dalam kitab

(I/426) menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

Madzhab Hanafi: Muhammad Umaim Al-Barkati dalam kitab

حاشية رد المحتار^{الفقه} dan kitab^ه menyebutkan pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.

Madzhab Maliki: Al Qurtubi dalam kitab (II/242)

mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. Berdasarkan Al Quran^{ي حبه} (Al Baqarah 2:177).

Madzhab Hanbali: Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan

pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah (الكلف السلطانية). Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah dalam^ه menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta.

b. Ulama Kontemporer (muta'akhirin).

Pendapat ulama kontemporer yang mewajibkan pajak adalah

pendapat Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan di alokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Ulama fiqih kontemporer yang membolehkan pajak antara lain Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi dengan argumen sebagai berikut:

1. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسير المنار) V/39 dalam menafsiri Quran surat An-Nisa 29 demikian:

ذلك بأن الإسلام يجعل مال كل فرد من أفراد المتبعين له مالا لأمتة كلها، مع احترام الحيازة والملكية، وحفظ حقوقها؛ فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقاً معينة لصالح العامة، كما يوجب عليه وعلى صاحب المال القليل حقوقاً أخرى لذوي الاضطرار من الأمة، ويحث فوق ذلك على البر

Arti kesimpulan: adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan.

2. Yusuf Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menyatakan

ومن الطبيعي جداً أن زيادة عدد السكان تحتاج إلى زيادة في الإنفاق، كل هذا يفتقر إلى مقادير كبيرة من المال، قد تعجز الدولة إيجاده وتوفيره ولا يكون سبيل إلى ذلك إلا بفرض الضرائب؛ وعندها تكون هذه الضرائب نوعاً من الجهاد بالمال، والمسلم مأمور بذلك؛ ليحمي دولته ويقوي أمتة ويحمي دينه وماله وعرضه

Arti kesimpulan: Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta.

3. Mahmud Syaltut, mufti Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra () menyatakan bahwa

جاز له وقد يجب، أن يضع عليهم من الضرائب ما يحقق به تلك المصالح دون إرهاق أو إغناء

Artinya: boleh bagi hakim memungut pajak dari orang kaya untuk kemaslahatan dengan tanpa berlebihan.

4. Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfaq di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk menaati atau patuh kepada pemimpin. Ayat Alqur'an yang memerintahkan patuh/taat kepada pemimpin adalah surah An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

B. Tinjauan Praktek.

III.I. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu, terlambat lapor SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

Gambar Tabel III.I.

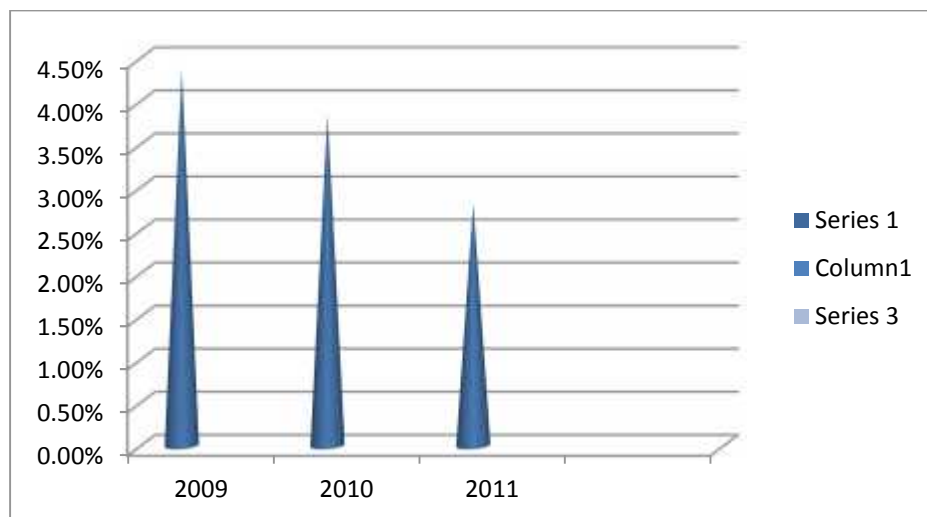
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan atau menyampaikan SPT Masa PPN Per Tahun 2009, 2010, 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

NO	Tahun	Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Rengat	Jumlah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN tepat waktu	Jumlah PKP yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
1	2009	2.158	90	4
2	2010	2.225	60	25
3	2011	2.338	26	40

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). KPP Pratama Rengat

Gambar Diagram III.I.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN Per Tahun 2009, 2010, 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat dalam (%)



Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). KPP Pratama Rengat

Dari tabel- tabel di atas dapat di lihat yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami perubahan berupa Penurunan kepatuhan wajib pajak Setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan Jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN meningkat setiap tahunnya.

III.2. Faktor- faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak di antaranya :

1. Kurangnya pengetahuan wajib pajak.

Hasil penelitian yang di lakukan Aziza (2012 :10) Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi dalam Rahman, 2012:1)

2. Sikap Wajib Pajak.

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain atau *issue* (Azwar, 2000) dalam Saraswati(2012 : 15). Notoatmojo (1997) dalam Saraswati(2012:15) juga mengatakan sikap merupakan respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Pendapat lain dari Heri Purwanto, 1998 dalam Miladia, 2010 dalam saraswati,(2012 : 15) sikap yaitu pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek itu sendiri. Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut. Hidayat, 2010 dalam Saraswati (2012 :16).

Sedangkan Rakhmat (1996) dalam saraswati (2012:16) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Menurut Thurstone (1931) dalam Jatmiko (2006) dalam Saraswati (2009:16), sikap dipandang sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu objek psikologis. Sedangkan menurut Berkowitz (1972) dalam Darmayanti

(2004) dalam Saraswati (2012: 16), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latarbelakang individu, motivasi dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku.

3. Niat Berperilaku Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, niat adalah Maksud atau tujuan suatu perbuatan; Kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Niat erat kaitannya dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat yang baik akan mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Perbuatan atau tindakan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Jika ini terus diulang-ulang, terinternalisasi dan persistent dalam diri seseorang, maka akan terciptalah pribadi dengan perilaku yang baik, begitu pula sebaliknya. (Suharto 2008 , dalam Hidayat 2010, dalam Saraswati (2012 :1)

4. Iklim Keorganisasian Wajib Pajak.

Reichers dan Schneider (1990) dalam Supriyati dan Hidayati (2008) dalam Saraswati (2012:20), mengatakan bahwa iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun tidak formal. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax professional* untuk

berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

5. Kualitas Pelayanan .

Menurut gardian dan Haryanto(2006) dalam Sayyida Aziza (2012:5) Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak (Gardian & Haryanto,2006; 19).

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara -cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Rustiyaningsih : 2011: 50) . Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang Pelayanan umum.
- b) Mendorong upaya keefektifan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat di selenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (Efisien dan Efektif).
- c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran, serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas pelayanan dapat di ukur dengan memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat di percaya yang di miliki oleh parat pajak. Di samping itu, juga mudah dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik. Memahami kebutuhan wajib pajak,

tersedianya fasilitas fisik, termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (Ni,Luh : 2006 dalam Rustiyaningsih :2011: 50) .

III.3. Perbandingan perhitungan PPN yang di terapkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Contoh soal :

Pada bulan januari 2013 PT Sinar Jaya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Maju bersama dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. 2.000.000 belum termasuk PPN. Dan pada bulan yang sama PT Sinar Jaya membeli barang kena pajak senilai 990.0000 belum termasuk PPN.

a. Perhitungan PPN menurut KUP.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak.

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 2.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 2000.000 = 200.000 \text{ (Pajak Keluaran)}$$

$$\text{Harga Jual} = \text{RP } 2.000.000 + 200.000 = 2200.000$$

2. Membeli Barang Kena Pajak

$$\text{DPP} = 990.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 990.000 = 99000 \text{ (Pajak Masukkan)}$$

$$\text{Harga Pembelian} = 99000 + 99000 = 1089000.$$

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Pajak keluaran} - \text{Pajak Masukkan.}$$

$$\text{Rp } 200.000 - 99000 = 101000 \text{ (PPN terutang yg harus di setor)}$$

b. Perhitungan PPN menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

1. PT Sinar Jaya melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak.

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 2.000.000$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 2000.000 = 200.000 \text{ (Pajak Keluaran)}$$

$$\text{Harga Jual} = \text{Rp } 2.000.000 + 200.000 = 2200.000$$

2. PT Sinar Jaya membeli Barang Kena Pajak.

$$\text{DPP} = 990.000$$

$$\text{PPN} = 0\% \times 990.000 = 0 \text{ (Pajak Masukkan)}$$

$$\text{Harga Jual} = 990.000 + 0 = \text{Rp. } 990.000$$

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Pajak keluaran} - \text{Pajak Masukkan.}$$

$$\text{Rp } 200.000 - 0 = \text{Rp } 200.000. (\text{PPN yang harus di setor}).$$

III.4.Kebijakan KPP Pratama Rengat dalam meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam pelaporan surat Pemberitahuan (SPT).

Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi KPP kepada Wajib Pajak baik secara Lansung maupun tidak langsung.
 - a. Sosialisasi secara langsung yang di lakukan oleh KPP Pratama Rengat dengan memberi pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Pemahaman ketentuan perpajakan meliputi pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ini

di tangani oleh *Account representative* (AR) di bagian seksi pengawasan dan Konsultasi.

- b. Sosialisasi secara tidak langsung yang di lakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama adalah dengan memberi informasi Perpajakan melalui media cetak dan media Massa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
3. Meningkatkan pengawasan, memberi himbauan kepada Wajib Pajak, yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan kepada wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN.

III. 5. Kendala-kendala yang di hadapi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Kendala- kendala yang di hadapi oleh KPP Rengat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah :

1. Lokasi jauh
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak.
3. Masih adanya pandangan negatif wajib pajak terhadap petugas pajak.
4. Masih adanya petugas pajak yang kurang profesional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di bahas oleh penulis dapat di simpulkan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat adalah:

1. Kurangnya Pengetahuan Wajib pajak
2. Sikap Wajib Pajak
3. Niat Berperilaku Wajib Pajak.
4. Iklim keorganisasian Wajib Pajak.
5. Kualitas Pelayanan.

Kebijakan yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) khususnya SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

1. Sosialisasi KPP kepada Wajib Pajak baik secara Lansung maupun tidak langsung.
 - a. Sosialisasi secara langsung yang di lakukan oleh KPP Pratama Rengat , dengan memberi pemahaman kepada Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Pemahaman ketentuan perpajakan meliputi pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman mengenai Surat

Pemberitahuan (SPT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal ini di tangani oleh *Accont resepresentative* (AR) di bagian seksi pengawasan dan Konsultasi.

b. Sosialisasi secara tidak langsung yang di lakukan oleh kantor pelayanan pajak Pratama adalah dengan memberi informasi Perpajakan melalui media cetak dan media Massa.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
2. Meningkatkan pengawasan, memberi himbauan kepada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, dan kepada wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN.

B. Saran

Petugas pajak sebaiknya lebih giat lagi dalam menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak terhadap masyarakat serta memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak lebih mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal melayani Wajib Pajak, Petugas Pajak sebaiknya melakukan pelayanan yang berkualitas agar Wajib Pajak merasa puas dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustinus , Sonny, Isnianto Kurniawan. 2011. Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Andi. Yogyakarta.
- Casavera ,2009. Perpajakan. Graha Ilmu . Yogyakarta.
- Fitriandi, Primandita.dkk.2011: Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan , Edisi Revisi tahun 2008. Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak : konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Andi. Yogyakarta
- Muljono, djoko. 2010: Panduan brevet pajak. Andi. yogyakarta .
- Purwono , Harry. 2010. Dasar dasar Pepajakan & Akuntansi pajak. Erlangga. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Sutedi. Adrian.2011. Hukum Pajak. Sinar grafika .Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2009. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia.Salemba Empat. Jakarta.
- Widodo .Widi,dkk. 2010. Moralitas , Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak. Alfabet Bandung.

Non Buku.

- Abufawaz. /الإسـلـمـالـفـقـهـفـيـوالـجـمـاركـالـضـرـائـبـأـحـكامـ/. di akses pada tanggal 08 April 2013 di web//http.wordpress.com
- Alqur'anul Karim, Surah An-nisa ayat 59.
- Aziza, Sayyida . 2011, Skripsi.Analisis Faktor- faktor yang mempengaruhi KepatuhanWajib Pajak. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Chairilfriendly. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di akses pada tanggal 07 Februari 2013 dari web/<http://blogspot.com>

Direktorat Jendral Pajak, *Peraturan Dirjen Pajak*, di akses pada tanggal 07 Februari 2013. dari Pajak Web: [Http//:pajak online.com](http://pajak online.com)

Direktorat Jendral Pajak, *Peraturan Dirjen Pajak*, di akses pada tanggal 15 Februari 2013. dari Pajak Web: [Http//:pajak online.com](http://pajak online.com).

Muhammad Wasitho. Artikel. hukum-pajak-dalam-islam di akses pada tanggal 04 April 2013 di web// <http://www.alkhoirot.net/>.

Nugroho. Adi : 2012 : Journal : Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervenin: Universitas Diponegoro.

Nurkholis. Artikel. /wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif indonesia/ staff.uui.ac.id

Rustiyaningsih, Sri. 2011, Skripsi. Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
Universitas Kristen widya Mandala.

Saraswati. 2012. Skripsi. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Universitas Diponegoro Semarang.